

ABSTRAK

Mu'ammarr Kadhafi, NIM 126103201006, Kekosongan Hukum Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tulungagung, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

Kata Kunci : kekosongan hukum, pembiayaan, PTSL.

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kesenjangan antara *Das Solen* dan *Das Sein*, yang mana Kabupaten Tulungagung melaksanakan program PTSL pertama kali pada tahun 2018 yang akan diselesaikan pada tahun 2025 mendatang, dengan target sasaran 630.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi. Secara normatif, ketentuan pembiayaan PTSL yang ada dalam SKB 3 Menteri “katagori V (Jawa dan Bali) pada khususnya Kab Tulungagung dipatok Sebesar 150.000.00 Rupiah”. Sedangkan faktualnya di Kab. Tulungagung pembiayaan PTSL rata – rata dipatok dengan besaran biaya 300.000 per sertifikat. Pembebanan biaya 300 ribu kepada masyarakat tersebut tidak menjadi problematika hukum asalkan adanya aturan yang dijadikan payung hukum dilingkup daerah, namun yang terjadi di Kab. Tulungagung tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai penentuan biaya persiapan PTSL kedalam Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana akibat dari tidak dianggarkannya biaya persiapan PTSL kedalam APBD, serta kurangnya biaya dilapangan apabila kemudian mengacu pada ketentuan besaran biaya yang terdapat dalam SKB 3 Menteri. Sehingga pemungutan biaya persiapan PTSL di Kab. Tulungagung dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam SKB 3 Menteri.

Rumusan masalah yang akan diangkat adalah: 1. Bagaimana

Kekosongan Hukum Dalam Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Tulungagung? 2. Bagaimana Solusi Atas Kekosongan Hukum Dalam Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Tulungagung? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemaslahatan Adanya Aturan Program PTSL di Kabupaten Tulungagung?

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang mana dalam menganalisis suatu problematika menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang terkait sebagai acuannya. penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai regulasi yang mengatur suatu hal tertentu, menganalisis hubungan antara regulasi serta korelasinya dengan menjelaskan suatu permasalahan dan implikasinya yang akan terjadi di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, adanya kesenjangan antara *Das Dolen* dan *Das Sein* yang mana pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tulungagung tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta tidak adanya aturan mengenai penentuan besaran biaya persiapan PTSL yang menjadi beban masyarakat kedalam Peraturan Bupati, sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memprotes keras karena tidak adanya dasar hukum dalam mematok besaran biaya 300 ribu per sertifikat. Sebab dari kekosongan hukum berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dalam hal pemungutan biaya persiapannya, yang mana berimplikasi, tidak adanya rasa aman dan nyaman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemungutan biaya persiapan PTSL karena tidak terdapat payung hukum yang dapat dijadikan dasar, serta adanya masyarakat yang ambigu dalam melaksanakan pembiayaan, sehingga terdapat rasa curiga dan penolakan dari masyarakat. **Kedua**, urgensi adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai penentuan biaya persiapan PTSL yang ada di Daerah Kabupaten/Kota merupakan

instruksi yang diamanatkan dalam diktum kesembilan SKB 3 Menteri dan diktum ketigabelas Inpres 2/2018, yang pada intinya “Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan PTSL dengan mengatur, dan menetapkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan PTSL yang tidak tertampung dalam APBD”, maka dari itu penting bagi Bupati/Walikota untuk membuat peraturan turunan dari SKB 3 Menteri dan Inpres Nomor 2/2018 tentang penetapan biaya persiapan PTSL. Berangkat dari fenomena ini, untuk itu penulis menawarkan rekomendasi regulasi Tentang Penentuan Biaya Persiapan PTSL yang ada di Kab. Tulungagung yang meliputi : Perencanaan (pembentukan panitia pelaksana PTSL di Desa/Kelurahan), Pelaksanaan (Sosialisasi), Pembiayaan (Kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengandaan patok dan materai, kegiatan operasional petugas, dan penentuan besaran biaya), dan Pengawasan (pertanggungjawaban). **Ketiga**, adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan biaya persiapan PTSL yang ada di Kabupaten Tulungagung sangatlah relevan dengan syarat masalah mursalah menurut Abdul Wahhab Khallaf. Yang mana masalah yang dimaksud ialah masalah yang tidak berdasarkan asumsi, dengan terealisasinya kepastian hukum yang berwujud peraturan yang bersifat deklarasi, masyarakat akan mendapat kepastian perihal biaya yang harus dikeluarkan tanpa menaruh rasa curiga akan ambiguitas kepada pihak penyelenggara program PTSL. Adanya kepastian hukum tersebut juga memberikan kemaslahatan yang bersifat umum, yang mana bermanfaat bagi masyarakat, dan Pemerintah. Serta Adanya kepastian hukum tersebut tidaklah bertentangan dengan dalil syara’. Sehingga adanya Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan biaya persiapan PTSL di Kab. tulungagung dapat diklasifikasikan kedalam tingkatan masalah Al-Hajjiyyah, yang mana dengan hal tersebut masyarakat akan dapat dengan mudah menyempurnakan serta adanya keringanan dalam mendapatkan kebutuhan primer manusia yakni kepastian

hukum hak atas tanah yang berbentuk sertifikat tanah sebagai bukti autentiknya (masalah daruriyyah), sebagaimana yang termuat dalam Q.S Al – Baqarah Ayat 185.

ABSTRACT

Mu'ammarr Kadhafi, NIM 126103201006, Legal Vacancy in the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Tulungagung Regency, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Yusron Munawir, S.H.I, M.H.

Keywords: legal vacuum, financing, PTSL.

This research is motivated by the gap between Das Solen and Das Sein, where Tulungagung Regency implemented the PTSL program for the first time in 2018 which will be completed in 2025, with a target of 630,000 parcels of land that must be certified. Normatively, the PTSL financing provisions in the SKB 3 Ministers "category V (Java and Bali) in Tulungagung Regency in particular are set at 150,000.00 Rupiah". Meanwhile, factually in Tulungagung Regency, the average PTSL financing is pegged at a cost of 300,000 per certificate. The imposition of a fee of 300 thousand to the community does not become a legal problem as long as there is a regulation that is used as a legal umbrella at the regional level, but what happens in Tulungagung Regency is the absence of regulations governing the determination of PTSL preparation costs into Regent / Mayor Regulations as a result of not budgeting PTSL preparation costs into the APBD, as well as the lack of costs in the field when then referring to the provisions of the amount of fees contained in the SKB 3 Minister. So that the collection of PTSL preparation fees in Tulungagung Regency can be categorized as an act that is contrary to the provisions in the SKB 3 Minister.

The formulation of the problems that will be raised are: 1. How is the Legal Vacancy in the Implementation of the PTSL Program in Tulungagung Regency? 2. How is the Solution to the

Legal Vacancy in the Implementation of the PTSL Program in Tulungagung Regency? 3. How is the Islamic Law Review of the Benefit of the PTSL Program Rules in Tulungagung Regency?

In this study using the Normative research method which in analyzing a problematic using legislation, legal doctrine, and related legal theories as a reference. research that provides a systematic explanation of the regulations governing a particular matter, analyzing the relationship between regulations and their correlation by explaining a problem and its implications that will occur in the future.

The results showed that First, there is a gap between Das Dolen and Das Sein where the financing of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Tulungagung Regency is not budgeted in the Regional Budget (APBD) and there are no rules regarding the determination of the amount of PTSL preparation costs that are borne by the community in the Regent's Regulation, so that Non-Governmental Organizations (NGOs) protested strongly because there was no legal basis for setting the amount of the 300 thousand fee per certificate. The reason for the legal vacuum results in legal uncertainty in terms of collecting the preparation fee, which has implications, there is no sense of security and comfort for the Village Government in carrying out the collection of PTSL preparation fees because there is no legal umbrella that can be used as a basis, as well as an ambiguous community in carrying out financing, so there is suspicion and rejection from the community. Second, the urgency of the Regent/Mayor Regulation regarding the determination of PTSL preparation costs in the Regency / City is an instruction mandated in the ninth dictum of the SKB 3 Minister and the thirteenth dictum of Presidential Instruction 2/2018, which in essence "Regents / Mayors to support the implementation of the acceleration of PTSL by regulating, and determining the amount of costs required in the PTSL preparation documents that are not

accommodated in the APBD”, therefore it is important for Regents / Mayors to make derivative regulations from SKB 3 Minister and Presidential Instruction Number 2/2018 regarding the determination of PTSL preparation costs. Departing from this phenomenon, for this reason the author offers regulatory recommendations regarding the Determination of PTSL Preparation Costs in Tulungagung Regency which include: Planning (formation of the PTSL implementation committee in the village), Implementation (Socialization), Financing (Document preparation activities, activities for marking stakes and stamps, operational activities of officers, and determining the amount of fees), and Supervision (accountability). Third, the Regent/Mayor Regulation regarding the determination of PTSL preparation costs in Tulungagung Regency is very relevant to the requirements of masalah mursalah according to Abdul Wahhab Khallaf. Where the masalah in question is a masalah that is not based on assumptions, with the realization of legal certainty in the form of declaratory regulations, the community will get certainty regarding the costs that must be incurred without suspecting the ambiguity of the PTSL program organizers. The existence of legal certainty also provides general benefits, which are beneficial to the community and the Government. And the existence of legal certainty is not contrary to the shara' postulates. So that the Regent / Mayor Regulation regarding the determination of PTSL preparation costs in the regency of tulungagung can be classified into the level of masalah Al-Hajjiyyah, with which the community will be able to easily perfect and there is relief in obtaining primary human needs, namely legal certainty of land rights in the form of land certificates as authentic evidence (masalah daruriyyah), as contained in Q.S Al-Baqarah Verse 185.

الملخص

، الشواغر القانونية في تنفيذ برنامج NIM 126103201006 معمار قذافي، التسجيل المنهجي الكامل للأراضي في محافظة تولونجانونج، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة سيد علي رحمة الله تولونجانونج، 2024، مشرف: يسرون مناور، س. ح. إ. م. ح.

PTSL. الكلمات المفتاحية: فراغ قانوني، تمويل،

الدافع وراء هذا البحث هو الفجوة بين داس سولين وداس سين، حيث نفذت محافظة لأول مرة في عام 2018 والذي سيكتمل في عام 2025، PTSL تولونجانونج برنامج مع هدف 630,000 قطعة أرض يجب أن تكون معتمدة. من الناحية المعيارية، فإن أحكام الوزراء "الفئة الخامسة (جاوة وبالي) ولا سيما 3 SKB في PTSL تمويل برنامج محافظة تولونجانونج محددة بـ 150,000.00 روبية". وفي الوقت نفسه، في الواقع في محافظة تولونجانونج محدد PTSL في محافظة تولونجانونج، فإن متوسط تمويل بتكلفة 300,000.00 روبية للشهادة الواحدة. ولا يعد فرض رسوم قدرها 300 ألف على المجتمع المحلي مشكلة قانونية طالما أن هناك لائحة تُستخدم كمظلة قانونية على المستوى الإقليمي، ولكن ما يحدث في محافظة تولونجانونج هو عدم وجود لوائح تنظم تحديد في لوائح الوالي/العمدة نتيجة عدم وضع ميزانية لتكاليف إعداد PTSL تكاليف إعداد في ميزانية المحافظة/العمدة، وكذلك عدم وجود تكاليف في الميدان إذا تم الرجوع PTSL بعد ذلك إلى أحكام مبلغ التكاليف الواردة في لائحة مجلس المحافظة 3. ولذلك، يمكن تصنيف تحصيل رسوم إعداد سجلات قيد الأراضي الزراعية في محافظة تولونجانونج SKB 3 على أنه عمل يتعارض مع الأحكام الواردة في وزير

وصياغة المشاكل التي سيتم طرحها هي: 1. كيف يتم حل الفراغ القانوني في تنفيذ في محافظة تولونجانونج؟ 2. كيف يتم حل مشكلة الفراغ القانوني في PTSL برنامج في محافظة تولونجانونج؟ 3. كيف يتم مراجعة الشريعة PTSL تنفيذ برنامج في محافظة تولونجانونج؟ PTSL الإسلامية للاستفادة من قواعد برنامج

ويستخدم هذا البحث أسلوب البحث المعياري الذي يعتمد في تحليله لمشكلة ما على التشريعات والفقه القانوني والنظريات القانونية ذات الصلة، وهو بحث يقدم شرحاً منهجياً للوائح التي تحكم مسألة معينة، ويحلل العلاقة بين اللوائح وترابطها من خلال شرح المشكلة وآثارها التي ستحدث في المستقبل.

أظهرت النتائج أنه أولاً، هناك فجوة بين داس دولين وداس سين حيث لم يتم إخراج في محافظة تولونجانونج (PTSL) تمويل التسجيل المنهجي الكامل للأراضي

التي PTSL ولا توجد قواعد بشأن تحديد مبلغ تكاليف إعداد (APBD) الميزانية الإقليمية يتحملها المجتمع في لائحة المحافظ، حتى أن المنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) احتجت بشدة لعدم وجود أساس قانوني لتحديد مبلغ رسوم 300 ألف لكل شهادة. والسبب في الفراغ القانوني ينتج عنه عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بتحصيل رسوم الإعداد، مما يترتب عليه آثاره، فلا يوجد شعور بالأمان والراحة لحكومة القرية في القيام بتحصيل رسوم إعداد شهادة إعداد الشهادة لعدم وجود مظلة قانونية يمكن استخدامها كأساس، وكذلك غموض المجتمع في القيام بالتمويل، لذلك هناك شك ورفض من المجتمع. ثانيًا: إن الحاجة الملحة إلى لائحة المحافظ/العمدة فيما يتعلق بتحديد تكاليف إعداد لائحة في المحافظة/المدينة هي تعليمات منصوص عليها في المذكرة التاسعة لوزير PTSL والمذكرة الثالثة عشرة من التعليمات الرئاسية رقم 2/2018، والتي في جوهرها SKB 3 من خلال تنظيم وتحديد مقدار PTSL على المحافظين/العمد دعم تنفيذ تسريع لائحة” لذلك، “APBD التي لا يتم استيعابها في PTSL التكاليف المطلوبة في وثائق إعداد لائحة والتعليمات SKB 3 من المهم أن يقوم المحافظون/العمد بوضع لوائح مشتقة من وزير وانطلاقًا من هذه PTSL الرئاسية رقم 2/2018 فيما يتعلق بتحديد تكاليف إعداد لائحة الظاهرة، لهذا السبب يقدم المؤلف توصيات تنظيمية فيما يتعلق بتحديد تكاليف إعداد PTSL في محافظة تولونججونج والتي تشمل: التخطيط (تشكيل لجنة تنفيذ PTSL في القرية)، والتنفيذ (التنشئة الاجتماعية)، والتمويل (أنشطة إعداد الوثائق، وأنشطة وضع العلامات والأختام، والأنشطة التشغيلية للضباط، وتحديد مبلغ الرسوم)، والإشراف (المساءلة). ثالثًا، إن لائحة الوصي/العمدة فيما يتعلق بتحديد تكاليف إعداد قانون تنظيم إعداد المسلة في محافظة تولونججونج وثيقة الصلة بمتطلبات المسلة وفقًا لعبد الوهاب خلاف. عندما تكون المصلحة المعنية هي مصلحة لا تقوم على افتراضات، مع تحقيق اليقين القانوني في شكل لوائح معلنة، سيحصل المجتمع على اليقين فيما يتعلق بالتكاليف كما أن وجود اليقين PTSL التي يجب تكبدها دون الشك في غموض منظم برنامج القانوني يوفر أيضًا فوائد عامة تعود بالنفع على المجتمع والحكومة. ووجود اليقين القانوني لا يتعارض مع مسلمات الشرع. بحيث يمكن تصنيف لائحة الوصي / العمدة فيما يتعلق في ولاية تولونججونج إلى مستوى المصلحة، والتي يمكن PTSL بتحديد تكاليف إعداد للمجتمع أن يتقن بها بسهولة ويوجد راحة في الحصول على الاحتياجات الإنسانية الأولية، وهي اليقين القانوني لحقوق الأرض في شكل شهادات الأراضي كدليل موثوق (مصلحة درية)، كما ورد في ق. ق. البقرة الآية 185